

KETERBUKAAN INFORMASI

KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk (“PERSEROAN”)

Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham ini disampaikan oleh Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK 17/2020”).

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasihat hukum, akuntan publik, penasehat keuangan atau profesional lainnya.

Direksi Perseroan menyampaikan informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai rencana penambahan kegiatan usaha sebagai bagian dari kepatuhan Perseroan atas POJK 17/2020.



Kegiatan Usaha:

Menjalankan kegiatan dokumentasi dan penginformasian, pengorganisasian, penyimpanan, peminjaman dan kegiatan pencarian kembali arsip dan dokumen dalam bentuk kertas maupun data elektronik, serta implementasi penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras, dan kegiatan alih media melalui teknologi *imaging/ printing*.

Kantor Pusat:

Delta Silicon Industrial Park, Jalan Akasia II Blok A7-4A, Lippo Cikarang, Bekasi 17550

Telepon : 021-8990 7636

Faksimili : 021-897 2527

www.mmi.co.id

mmi.corsec@ironmountain.com

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan informasi sebagaimana diungkapkan di dalam Keterbukaan Informasi ini, dan setelah melakukan penelitian secara seksama, menegaskan bahwa tidak ada fakta penting material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan dalam Keterbukaan Informasi ini sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Bekasi pada tanggal 2 Agustus 2024

DEFINISI

Hasil Studi Kelayakan	: Hasil penilaian Studi Kelayakan atas Penambahan KBLI Perseroan yang dilakukan oleh KJPP Ferdinand, Damar, Ichsan dan Rekan dengan laporan No. 000987/2.0176-00/BS/05/0089/1/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024.
Keterbukaan Informasi	: Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK 17/2020.
KJPP	: Kantor Jasa Penilai Publik Ferdinand, Damar, Ichsan dan Rekan.
OJK	: Singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengganti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.
Perseroan	: PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Bekasi.
POJK 15/2020	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK 17/2020	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
RUPSLB	: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada Para Pemegang Saham Perseroan berkaitan rencana Perseroan memperluas peluang pelayanan jasa kearsipan di pasar Indonesia dengan menambah kegiatan usaha baru berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) dalam Anggaran Dasar Perseroan. Penambahan kegiatan usaha baru berdasarkan KBLI tersebut adalah sebagai berikut:

No	KBLI	Kegiatan Usaha
1	62090	Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya
2	82110	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor
3	81100	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas
4	78300	Penyedia Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Daya Manusia
5	38220	<i>Treatment</i> dan Pembuangan Limbah Berbahaya

Penambahan kegiatan usaha ini akan mengubah Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha, dimana Perseroan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Pemegang Saham Perseroan atas rencana penambahan kegiatan usaha melalui pelaksanaan RUPSLB sebagaimana dinyatakan dalam Keterbukaan Informasi ini.

Berdasarkan hal-hal di atas dan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf (c) POJK 17/2020, Keterbukaan Informasi ini menjadi dasar pertimbangan maupun gambaran yang lengkap bagi para Pemegang Saham Perseroan untuk memberikan persetujuan atas rencana penambahan kegiatan usaha berdasarkan KBLI dalam rangka memperluas peluang pelayanan jasa kearsipan di pasar Indonesia, yang akan diusulkan dalam RUPSLB.

II. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

A. Riwayat Singkat Perseroan

PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk (“Perseroan”) didirikan berdasarkan Akta Notaris Misahardi Wilamarta, S.H., No. 157 tanggal 9 Juli 1992 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-2420.HT.01.01.TH.94 tanggal 12 Februari 1994 dan diumumkan di Lembaran Berita Negara No. 49 tanggal 21 Juni 1994.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 42 tanggal 12 April 2021 yang dibuat oleh Lucy Octavia Siregar, S.H., Sp.N., Notaris di Bekasi mengenai perubahan beberapa pasal dalam anggaran dasar Perseroan. Perubahan ini telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam surat No. AHU-AH.01.03-0262807 dan surat No. AHU-AH.01.03-0264357 yang keduanya tertanggal 26 April 2021.

Kantor pusat operasional Perseroan beralamat di Delta Silicon Industrial Park, Jl. Akasia II Blok A7-4A, Lippo Cikarang, Bekasi 17550. Perseroan beroperasi di Lippo Cikarang, Medan, Palembang, Pekanbaru, Bandung, Kendal (Semarang), Klaten, Surabaya, Pasuruan, Bali, Makassar, Balikpapan, Padang dan Batam. Perseroan mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 1993.

B. Kegiatan Usaha Perseroan

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang kesenian, hiburan dan rekreasi, di bidang aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, di bidang aktivitas pengangkutan dan pergudangan, dan di bidang perdagangan dan eceran.

Saat ini Perseroan melakukan kegiatan dokumentasi dan penginformasian, pengorganisasian, penyimpanan, peminjaman dan kegiatan pencarian kembali arsip dan dokumen dalam bentuk kertas maupun data elektronik, serta implementasi penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras, dan kegiatan alih media melalui teknologi *imaging/printing*.

Adapun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Perseroan saat ini antara lain:

1. KBLI 47650 – Perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/karton
2. KBLI 47919 – Perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya
3. KBLI 52109 – Pergudangan dan penyimpanan lainnya
4. KBLI 68110 – Real estate yang dimiliki sendiri atau disewa
5. KBLI 70209 – Aktivitas konsultasi manajemen lainnya
6. KBLI 91012 – Perpustakaan dan arsip swasta

C. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sharestar Indonesia, per tanggal 30 Juni 2024, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Lembar Saham	Persentase (%)
Iron Mountain Hongkong Limited	752.632.700	99,35
Kepemilikan Publik (masing-masing dibawah 5%)	4.948.300	0,65
Total	757.581.000	100

D. Struktur Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 08 tanggal 30 April 2024 yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan No. AHU-AH.01.09-0201172 tanggal 14 Mei 2024, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Gregory Mark Lever
Komisaris	: Richard Gordon Johnstone
Komisaris Independen	: Patricia Marina Sugondo

Dewan Direksi

Presiden Direktur	: Joyce Housien
Direktur	: Siva Kumar K Indran
Direktur	: Sylvia Lestariwati F K

III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

KJPP Ferdinand, Dinar, Ichsan, dan Rekan (selanjutnya disebut “KJPP FDI&R” atau “Kami”) mendapat penugasan dari PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) untuk memberikan penilaian kelayakan atas penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) baru (KBLI 62090, 82110, 81100, 78300, dan 38220) dengan tanggal penilaian per 31 Maret 2024 (selanjutnya disebut sebagai “Objek Studi Kelayakan”), dapat kami sampaikan perihal sebagai berikut:

Objek Studi Kelayakan

Objek studi kelayakan adalah kelayakan atas penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) antara lain dengan kode KBLI berikut:

- KBLI 62090 – Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya
- KBLI 82110 – Aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor
- KBLI 81100 – Aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas
- KBLI 78300 – Penyedia sumber daya manusia dan manajemen fungsi daya manusia
- KBLI 38220 – Treatment dan pembuangan limbah berbahaya

Maksud dan Tujuan Studi Kelayakan

Maksud dan tujuan dari penugasan ini adalah untuk memberikan penilaian kelayakan atas penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) baru (KBLI 62090, 82110, 81100, 78300, dan 38220), serta dalam rangka pemenuhan POJK 17/2020.

Tanggal Penilaian

Tanggal studi kelayakan ini adalah 31 Maret 2024.

Pendekatan dan Metodologi Studi Kelayakan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal serta Surat Edaran OJK No. 17/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, pendekatan dan metodologi untuk melakukan studi kelayakan bisnis atas penambahan KBLI baru adalah melakukan analisis atas:

- Kelayakan Pasar
- Kelayakan Teknis
- Kelayakan Pola Bisnis
- Kelayakan Model Manajemen
- Kelayakan Keuangan

Konfirmasi Bahwa Penilaian Dilakukan Berdasarkan Peraturan dan Standar

Penugasan ini dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian Dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal serta Surat Edaran OJK No. 17/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia Tahun 2018 Edisi VII (KEPI & SPI Edisi VII-2018).

Analisis Kelayakan Pasar

Pangsa pasar Perseroan yang terus meningkat, dengan ditunjukkan oleh naiknya pendapatan serta meningkatnya permintaan dari pelanggan. Perseroan terus berupaya menjadi mitra terpercaya bagi pelanggan untuk melindungi dan memanfaatkan nilai hal yang paling penting bagi pelanggan. Perseroan memanfaatkan teknologi dan tetap *on-track* dalam mengembangkan bisnis utamanya.

Perseroan menargetkan target pendapatan meningkat 10% pada tahun 2024. Perseroan mengembangkan layanan dan jasanya dengan penambahan kegiatan usaha Perseroan. Perseroan aktif mengikuti berbagai tender proyek pengadaan dari instansi swasta maupun pemerintah, serta melakukan *business-to-business direct deals* untuk mengetahui kebutuhan pelanggan secara pasti.

Analisis Kelayakan Teknis

Kapasitas saat ini yang dimiliki Perseroan masih mencukupi dan menunjang atas rencana penambahan kegiatan usaha. Ketersediaan dan kualitas sumber daya yang dimiliki Perseroan masih cukup memadai dan dioptimalkan. Alur produksi yang sudah sistematis dan memiliki prosedur baku, memastikan pelayanan jasa dapat dilakukan dengan baik.

Analisis Kelayakan Pola Bisnis

Dengan keunggulan kompetitif dan keunikan yang dimiliki oleh Perseroan diharapkan dapat memitigasi risiko persaingan, sehingga penambahan KBLI dapat meningkatkan kinerja Perseroan. Keuntungan yang diperoleh Perseroan dengan adanya Penambahan KBLI diharapkan dapat mendukung pertumbuhan jangka panjang Perseroan, serta dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan para pemegang saham.

Analisis Kelayakan Model Manajemen

Perseroan akan menambah karyawan sebagai *headcount outsource* untuk kegiatan usaha jasa penyedia sumber daya manusia dan manajemen fungsi daya manusia (78300). Serta Perseroan mempersiapkan pemberian pelatihan khusus terkait jasa *treatment* dan pembuangan limbah berbahaya (38220). Untuk jasa lainnya, karyawan yang saat ini dimiliki oleh Perseroan masih memadai dan mampu melayani atas jasa yang akan diberikan. Setiap tahun, Perseroan secara berkala menelaah seluruh profil risiko dan *risk appetite* sebagai bagian proses perencanaan mitigasi risiko.

Aktivitas manajemen risiko lainnya melibatkan identifikasi masalah, rencana mitigasi, akomodasi risiko dan rancangan langkah. Dalam rangka melakukan penambahan KBLI baru, Perseroan yakin bahwa kemampuan dan pengalaman manajemen yang cukup lama akan dapat mendukung penambahan KBLI Perseroan. Perseroan tidak melakukan penambahan divisi atau perubahan struktur organisasi terkait rencana penambahan KBLI.

Analisis Kelayakan Keuangan

Perhitungan analisis kelayakan investasi, diketahui bahwa nilai NPV sebesar Rp36.994 juta dimana nilai NPV > 0, untuk nilai IRR adalah sebesar 95% > dari tingkat diskonto dan untuk nilai PI adalah sebesar 15x. Dari hasil perhitungan tersebut dimana NPV > 0, IRR > tingkat diskonto dan PI > 1 maka dapat disampaikan bahwa investasi tersebut adalah layak.

Payback period (PP) atas rencana penambahan KBLI baru ini adalah pada tahun ke 3 dan bulan ke 7, hal tersebut merupakan jangka waktu yang cukup cepat untuk pengembalian investasi. Berdasarkan perhitungan titik impas tercapai pada angka penjualan 71,84% - 81,13% selama proyeksi, atau rata-rata titik impas tercapai pada angka 75,69%. Sedangkan perhitungan imbal balik investasi (*Overall Return on Investment*) selama proyeksi berkisar antara 0,71 – 5,77, atau secara rata-rata adalah sebesar 2,93. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa investasi atas penambahan KBLI adalah layak.

Kesimpulan Studi Kelayakan

Dengan mempertimbangkan analisis kelayakan atas objek studi kelayakan yang dilakukan meliputi analisis kelayakan pasar, analisis kelayakan teknis, analisis kelayakan pola bisnis, analisis analisis kelayakan model manajemen, analisis keuangan, maka kami berpendapat penilaian kelayakan bisnis atas penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) baru (KBLI 62090, 82110, 81100,78300, dan 38220) adalah Layak.

Pernyataan Independensi Penilai

Dalam mempersiapkan laporan pendapat studi kelayakan ini, KJPP FDI&R bertindak secara independen tanpa adanya benturan kepentingan, dan tidak terafiliasi dengan Perseroan, ataupun pihak-pihak lainnya yang terafiliasi dengan Perseroan. KJPP FDI&R juga tidak memiliki kepentingan ataupun keuntungan pribadi terkait dengan penugasan ini. Laporan pendapat studi kelayakan ini tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan atau merugikan pihak manapun. Imbalan yang kami terima sama sekali tidak dipengaruhi oleh kelayakan nilai yang dihasilkan dari proses analisis kelayakan ini.

Asumsi – Asumsi dan Kondisi Pembatas

- a. Laporan penilaian studi kelayakan ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b. Penilai Bisnis telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses penilaian studi kelayakan.

- c. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- d. Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- e. Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian studi kelayakan.
- f. Laporan Penilaian Bisnis ini terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- g. Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum Obyek Studi Kelayakan dari Pemberi Tugas.
- h. Penilai bertanggung jawab terhadap semua isi laporan penilaian studi kelayakan ini.
- i. FDI&R ingin menekankan bahwa hasil kajian, analisis, serta tanggung jawab kami secara khusus hanya terbatas pada aspek nilai atas obyek penilaian, di luar dari aspek perpajakan dan hukum karena hal tersebut berada di luar lingkup penugasan.
- j. Laporan penilaian ini dibuat dan ditujukan hanya kepada pemberi tugas, sesuai dengan maksud dan tujuan yang diungkapkan dalam laporan penilaian dan tidak dapat digunakan untuk maksud dan tujuan lainnya dan kami tidak bertanggung jawab jika laporan ini digunakan untuk tujuan lain.

IV. KETERSEDIAAN TENAGA AHLI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Sehubungan dengan rencana Penambahan Kegiatan Usaha, saat ini Perseroan telah memiliki sumber daya manusia yang dinilai cukup kompeten untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut.

V. PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Saat ini Perseroan melakukan kegiatan dokumentasi dan penginformasian, pengorganisasian, penyimpanan, peminjaman dan kegiatan pencarian kembali arsip dan dokumen dalam bentuk kertas maupun data elektronik, serta implementasi penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras, dan kegiatan alih media melalui teknologi *imaging/ printing*.

Perseroan ingin meningkatkan kinerja kedepannya, melalui penambahan KBLI Perseroan berharap akan dapat mengoptimalkan seluruh potensi dan kesempatan serta meningkatkan kinerja dan profitabilitas Perseroan di masa mendatang. Keuntungan yang diperoleh Perseroan dengan adanya Penambahan KBLI diharapkan dapat mendukung pertumbuhan jangka panjang Perseroan, serta dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan para pemegang saham.

VI. PENGARUH PERUBAHAN KEGIATAN USAHA PADA KONDISI KEUANGAN PERUSAHAAN PERSEROAN

Penambahan kegiatan usaha akan memberikan dampak yang positif bagi kelangsungan usaha Perseroan dan tentunya akan berdampak pula terhadap kondisi keuangan Perseroan. Dengan adanya penambahan kegiatan usaha ini, pendapatan usaha Perseroan akan mengalami peningkatan dan diharapkan ekuitas Perseroan semakin membaik di tahun-tahun yang akan datang. Hal ini diharapkan pula dapat memberikan nilai tambah bagi para Pemegang Saham Perseroan.

VII. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) sehubungan dengan persetujuan atas rencana Penambahan Kegiatan Usaha berdasarkan KBLI. RUPSLB tersebut akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Selasa, 10 September 2024
Waktu : 10.00 WIB - Selesai
Tempat : PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk
Delta Silicon Industrial Park, Jalan Akasia II Blok A7-4A,
Lippo Cikarang, Bekasi 17550.

Mata acara RUPSLB yang akan dimohonkan sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha baru berdasarkan KBLI tersebut adalah sebagai berikut:

- Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha beserta pembahasan studi kelayakan tentang penambahan kegiatan usaha Perseroan tersebut.

RUPSLB Perseroan akan diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020 Pasal 42, usulan dan pelaksanaan persyaratan kehadiran dan pengambilan keputusan dalam RUPSLB untuk mata acara tersebut adalah sebagai berikut:

- RUPS Perseroan dapat diselenggarakan apabila RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
- Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dengan hak suara yang sah dimana kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan telah ditetapkan oleh OJK atas permintaan Perseroan.

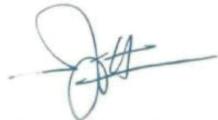
Dalam rencana perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha tersebut tidak memperoleh persetujuan RUPSLB, maka rencana penambahan kegiatan usaha baru dapat dimintakan persetujuan RUPSLB kembali paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPSLB yang tidak menyetujui penambahan kegiatan usaha tersebut.

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

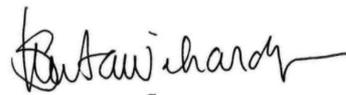
Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

Delta Silicon Industrial Park, Jalan Akasia II Blok A7-4A,
Lippo Cikarang, Bekasi 17550.
Telepon : 021-8990 7636
Faksimili : 021-897 2527
www.mmi.co.id
mmi.corsec@ironmountain.com

Bekasi, 2 Agustus 2024



Joyce Housien
Presiden Direktur



Sylvia Lestariwati F K
Direktur